



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



RENJA INDUK TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN BOALEMO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan dasar di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua ASN akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo ini, diharapkan apa yang dituangkan di dalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022.

Tilamuta, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



Dra. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660930 199702 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja	1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.....	20
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	21
3.4. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	22
3.5. Program dan Kegiatan	22
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB V : PENUTUP	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang merupakan dokumen perencanaan tahun kelima pada Renstra Tahun 2017-2022 yang masuk dalam perodesasi RPJPD Tahun 2011-2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang handal yang akan dilaksanakan Tahun 2022.
- b. Sebagai pedoman Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2022
- c. Sebagai tolok ukur OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I Merupakan *Bab Pendahuluan* yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan *Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu* yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III Merupakan *Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah* yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV Merupakan *Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah* yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dalam kurun waktu 2022.
- BAB V Merupakan *Bab Penutup*, yang memuat Catatan Penting, Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

1. Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2021 yaitu terdiri dari 5007 jiwa Jamkesda, 10.103 jiwa Jamkesta dan 71.628 jiwa PBI APBN, total yang terlayani adalah 86.738 jiwa dari yang ditargetkan 133.000 jiwa.
 - Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan meningkatkan penghasilan serta kemitraan usaha yang saling menguntungkan bagi kelompok penerima, jumlah penerima bantuan di Tahun 2021 adalah 23 kelompok dari yang di targetkan 35 kelompok.
 - Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan pada Tahun 2021 yaitu 12.936 KK dari yang ditargetkan 13.028 KK
 - Kegiatan Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 untuk aparat desa tidak ada capaian kinerja dari yang ditargetkan 82 Orang
2. Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan secara berkesinambungan, agar Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat terus meningkat sebagai lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, target kinerja 4 kali terealisasi 4 kali.
 - Untuk meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Tim Penggerak PKK Kabupaten melaksanakan kegiatan keterampilan membuat kacang goyang dan lomba Prilaku Hidup Sehat (PHBS) serta melakukan evaluasi-evaluasi terhadap

program PKK Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, realisasi capaian kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 100%.

- Jumlah Desa yang memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2021 sesuai target 82 Desa, terealisasi 82 Desa.
- Jumlah Dokumen Administrasi Kantor yang dibuat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sesuai target 7 Dokumen.
- Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terus di maksimalkan, sesuai target kinerja yaitu 20 kali.

3. Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun 2021 yaitu 4713 jiwa Jumlah ini melebihi target dari yang di targetkan 4000 jiwa.

Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2021 terdapat Program/Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target, sesuai target dan yang melebihi target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Dokumen Renstra OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, maka untuk Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2021 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Boalemo sebesar **Rp. 2.503.854.890,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.391.493.228,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** atau **95,51%** yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur dan kegiatan Pelayanan Publik, indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2021). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Penjelasan Sasaran Dari Capaian Kinerja 2021

- Sasaran 1

Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial, ditargetkan 4 Kali, realisasi 4 Kali.
- Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat, ditargetkan 133.000 Jiwa, realisasi 86.738 Jiwa
- Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan, ditargetkan 13.028 KK, realisasi 12.936 KK
- Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE, ditargetkan 35 Kelompok, realisasi 23 Kelompok
- Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial, ditargetkan 4000 Jiwa, realisasi 4713 Jiwa
- Sasaran 2
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
 - Jumlah Dokumen Administrasi Kantor, ditargetkan 7 Dokumen realisasi, 7 Dokumen
 - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ditargetkan 20 Kali, realisasi 20 Kali
- Sasaran 3
Berkembangnya Ekonomi Desa
 - Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, ditargetkan 100%, realisasi 100%
 - Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ditargetkan 82 Orang realisasi, 0 Orang
 - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditargetkan 2 Kegiatan, realisasi 2 Kegiatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas PMD Provinsi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan PMD dalam rangka pencapaian kinerja Pelayanan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakeholder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam

pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun yang akan datang.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu :
 1. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.
 2. Rencana pencapaian target tidak terukur dengan baik sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera sesuai Misi Bupati Boalemo yang dijabarkan dalam RENSTRA OPD 2017-2022.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Publik, berupa pembinaan dan pengembangan lembaga sosial, lembaga desa dan lembaga ekonomi desa dengan baik dan menyeluruh di Kabupaten Boalemo
- b. Meningkatkan Kompetensi Pegawai yang Tersedia untuk Melaksanakan Tupoksi menuju Standar Pelayanan Prima.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

- a. Terwujudnya konsep pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai arah pembangunan daerah pada lapisan masyarakat bawah.
- b. Terwujudnya pelayanan publik secara prima.
- c. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

d. Peningkatan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat diperdesaan dalam kehidupan sosial.

Tantangan-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

a. Tantangan

Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu:

- Rendahnya kesadaran masyarakat penerima bantuan dalam mengembangkan bantuan yang telah diberikan.
- Sulitnya mengakses data-data kesejahteraan sosial secara cepat dan akurat.
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi dinas lintas sektor.
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Terbukanya peluang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Boalemo.
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalemo 2017 -2022, sehingga Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo juga merupakan Renja tahun kelima dalam tahapan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia baik Pengelola Program Sosial maupun Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Program dan Kegiatan yang bisa menunjang pengurangan angka kemiskinan.

3. Meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan Sumber Daya yang ada di desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil penelaahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Meningkatnya ketersediaan bahan makanan bagi para korban bencana alam dan bencana sosial
3. Stabilitasnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat bagi penerima bahan pangan non tunai
4. Terpenuhinya pelayanan perlindungan jaminan sosial kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatnya pembentukan dan pendirian BUMDes di masing masing desa se Kabupaten Boalemo
6. Tercapainya penyelesaian dokumen, perencanaan, pertanggungjawaban dan program yang dilaksanakan di tingkat desa.

Dari penelaahan diatas dapat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan sesuai Program Renstra Tahun 2017-2022.

I. Program Pemberdayaan Sosial

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

II. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - h. Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga
 - 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - a. Pemberian Layanan Rujukan
- III. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- IV. Program Penanganan Bencana
 - 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
- V. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
 - 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- VI. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa
 - e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- VII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong"***

dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Indeks Partisipasi Sosial;
 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi Pembangunan Indonesia adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** dengan misi terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyerdehanaan Regulasi
Menyederhakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua undang-undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyerdehanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***"Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;

6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
 - Jumlah desa mandiri
 - Jumlah desa berkembang
 - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
 - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes berkembang
 - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :
 - Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :

- Penyerapan tenaga kerja perdesaan
- 9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
- 10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
- 11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
- 12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
- 13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
- 14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
 - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
- 15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
 - Nilai Reformasi Birokrasi
- 16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
- 17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
 - Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 4 (Empat) misi yaitu:

1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.
4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dengan mengacu kepada pada Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 3 (Tiga) misi yaitu:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;
- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;

- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Mengembangkan perekonomian perdesaan
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kegiatan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
2. Berkembangnya ekonomi desa
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

3.5. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD 2017-2022, dan rancangan awal RKPD 2022, maka program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Program Penanganan Bencana
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu Tahun 2022 sesuai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2022 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2022 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Tilamuta, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



Dra. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660903 199702 2 002

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2022
Kabupaten Boalemo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
1	06	Bidang Sosial													
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3.00				
1	06	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	300%	3.00			
1	06	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	300%	3.00			
1	06	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	60	3.00	
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100	20 Kali	60	3.00
1	06	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	100	7 Dok.	21	3.00	
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	100	7 Dok.	21	3.00
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial			Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	80%	50%	100%	100%	100	100%	250%	3.13	
1	06	02	2	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2.50	
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	10	2.50

1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial			Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	45%	106%	35%	73%	208	40%	219%	4.86	
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50	
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	01	11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50 Orang	150 Orang	25 Orang	17	150 Orang	225	1.50
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	143.000 Jiwa	120.293 Jiwa	123.000 Jiwa	89.475 Jiwa	73	133.000 Jiwa	342.768	2.40
1	06	04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	143.000 Jiwa	120.293 Jiwa	123.000 Jiwa	89.475 Jiwa	73	133.000 Jiwa	342.768	2.40

1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100%	83.94%	100%	103.16%	103.16	100%	287%	2.87	
1	06	05	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	10.914 KK	13.028 KK	13.432 KK	103	13.028 KK	37.374	2.87	
						Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	35 Klmpk	51 Klmpk	35 Klmpk	44 Klmpk	126	35 Klmpk	130	3.71	
1	06	05	2	02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	10.914 KK	13.028 KK	13.432 KK	103	13.028 KK	37.374	2.87
1	06	05	2	02	02	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	35 Klmpk	51 Klmpk	35 Klmpk	44 Klmpk	126	35 Klmpk	130	3.71
1	06	06	Program Penanganan Bencana			Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	45%	153%	35%	1073%	3,067	40%	12.669	28.15	
1	06	06	2	01	01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial	4.000 Jiwa	6.139 Jiwa	4.000 Jiwa	42.938 Jiwa	1,073	4.000 Jiwa	53.077	13.27
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial	4.000 Jiwa	6.139 Jiwa	4.000 Jiwa	42.938 Jiwa	1,073	4.000 Jiwa	53.077	13.27
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
2	13		Pemberdayaan Masyarakat Desa												
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa	82 Desa	65 Desa	82 Desa	126	70 Desa	234.00	3.34	
						Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75%	0%	70%	0%	-	75%	0.75	1.00	
2	13	04	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	100	82 Desa	246	3.00	

							Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3.00	3.00	
							Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	0 Org	82 Org	0 Org	-	82 Org	82	1.00	
							Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	82 BUMDes	65 BUMDes	82 BUMDes	126	82 BUMDes	246	3.00	
							Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Keg.	0 Keg.	1 Keg.	0 Keg.	-	1 Keg.	1	1.00	
2	13	04	2	01	03	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	100	82 Desa	246	3.00
2	13	04	2	01	04	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3.00	3.00
2	13	04	2	01	05	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	0 Org	82 Org	0 Org	-	82 Org	82	1.00
2	13	04	2	01	08	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	82 BUMDes	65 BUMDes	82 BUMDes	126	82 BUMDes	246	3.00
2	13	04	2	01	09	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Keg.	0 Keg.	1 Keg.	0 Keg.	-	1 Keg.	1	1.00
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				Persentase Organisasi yang Beranggotakan Jender	80%	100%	70%	100%	143	80%	3	3.50	
2	13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3.00	

2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3.00
---	----	----	---	----	----	---	---	--------	--------	--------	--------	-----	--------	---	------

Tilamuta, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dr. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boalemo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	- -	100 %	100 %	100 %	- -	100 %	100 %	100 %	- -	
2	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	- -	20 Kali	20 Kali	20 Kali	- -	20 Kali	20 Kali	20 Kali	- -	
3	Jumlah dokumen administrasi kantor	-	- -	7 Dok	7 Dok	7 Dok	- -	7 Dok	7 Dok	7 Dok	- -	
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	-	- -	4 Kali	4 Kali	4 Kali	- -	4 Kali	4 Kali	4 Kali	- -	
5	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	-	- -	123,000 Jiwa	133,000 Jiwa	143,000 Jiwa	- -	89,475 Jiwa	86,738 Jiwa	143,000 Jiwa	- -	
6	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	- -	150 Orang	150 Orang	150 Orang	- -	25 Orang	45 Orang	150 Orang	- -	
7	Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	-	- -	35 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	- -	44 Kel.	23 Kel.	35 Kel.	- -	
8	Jumlah KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian beras sejahtera (Rastra)	-	- -	13,028 KK	13,028 KK	13,028 KK	- -	- KK	12,936 KK	13,028 KK	- -	
9	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial			4,000 KK	4,000 KK	4,000 KK	- -	42,938 KK	4,713 KK	4,000 KK	- -	
10	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	- -	100 %	100 %	100 %	- -	100 %	100 %	100 %	- -	
11	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	-	- -	82 Org	82 Org	82 Org	- -	- Org	- Org	82 Org	- -	
12	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	- -	2 Keg	2 Keg	2 Keg	- -	2 Keg	2 Keg	2 Keg	- -	

Tilamuta, Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD

Dra. MONRU MOPANGGA
 NIP. 19660930 199702 2 002

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	100%	549,430,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	100%	549,430,000		
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%		
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	250,000,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	250,000,000
		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	250,000,000	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	250,000,000
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	299,430,000	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	299,430,000
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	299,430,000	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah dokumen administrasi kantor	7 Dok.	299,430,000	
2	Program Pemberdayaan Sosial	7 Kec.	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	80%	226,980,000	Program Pemberdayaan Sosial	7 Kec.	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	80%	226,980,000		
4	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	226,980,000	4	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	226,980,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	226,980,000	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	226,980,000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	45%	200,000,000	Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	45%	200,000,000		
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	100,000,000	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	100,000,000	

	1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	30,000,000		1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	30,000,000	
	2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	10,000,000		2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	10,000,000	
	3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	15,000,000		3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	15,000,000	
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000	
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	7,500,000		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	7,500,000	
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000	
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000	
	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	7,500,000		8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	7,500,000	
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000	
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	5,000,000	
	11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000		11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	3,000,000	
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	6,000,000		12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	6,000,000	
6		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	134.000 Jiwa	100,000,000		5	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	134.000 Jiwa	100,000,000	

		5	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	134.000 Jiwa	100,000,000		5	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	134.000 Jiwa	100,000,000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Kab. Boalemo	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100%	2,651,750,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Kab. Boalemo	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100%	2,651,750,000	
	7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	1,268,116,000	7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	1,268,116,000	
					Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	35 Klmpk	1,383,634,000					Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	35 Klmpk	1,383,634,000	
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Boalemo	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	1,268,116,000	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Boalemo	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	13.028 KK	1,268,116,000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Kab. Boalemo	Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	35 Klmpk					1,383,634,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Boalemo
		5	Program Penanganan Bencana			Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	45%	75,000,000	Program Penanganan Bencana					
7	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial	4000 Jiwa	75,000,000	7	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Kab. Boalemo	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial	4000 Jiwa	75,000,000		
	8		Penyediaan Makanan		Kab. Boalemo	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial		4000 Jiwa	75,000,000	8	Penyediaan Makanan		Kab. Boalemo	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial	4000 Jiwa
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	82 Desa	419,050,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDEs	82 Desa	419,050,000	
					Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	80%	385,260,000					Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	80%	385,260,000	
	8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	50,000,000	8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	50,000,000	
					Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	136,150,000					Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	136,150,000	

			Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	238,862,000			Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	238,862,000	
			Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	232,900,000			Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	232,900,000	
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Kegiatan	146,398,000			Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Kegiatan	146,398,000	
9	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	50,000,000	9	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	50,000,000
10	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	136,150,000	10	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase desa yang memasukkan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	136,150,000
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	238,862,000	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan/bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82 Org	238,862,000
12	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	232,900,000	12	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	82 BUMDes	232,900,000
13	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Kegiatan	146,398,000	13	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	1 Kegiatan	146,398,000
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Jender	100%	477,980,000		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Persentase desa yang maju (mandiri)	100%	477,980,000
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	477,980,000	9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	477,980,000

	11	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	477,980,000		11	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Keg.	477,980,000	
--	----	---	--------------	---	--------	-------------	--	----	---	--------------	---	--------	-------------	--

Tilamuta, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
	Bidang Sosial				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				

Tilamuta, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Bidang Sosial								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	Dinas Sosial Dan PMD	100%	549,430,000	DAU/DAK/PAD		100%	549,430,000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	100%	-	DAU/DAK/PAD		100%	-
1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	100%	-	DAU/DAK/PAD		100%	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Sosial Dan PMD	20 Kali	250,000,000	DAU/DAK/PAD		20 Kali	250,000,000
1	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Sosial Dan PMD	20 Kali	250,000,000	DAU/DAK/PAD		20 Kali	250,000,000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi kantor	Dinas Sosial Dan PMD	7 Dok.	299,430,000	DAU/DAK/PAD		7 Dok.	299,430,000
1	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kantor	Dinas Sosial Dan PMD	7 Dok.	299,430,000	DAU/DAK/PAD		7 Dok.	299,430,000
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	Kab. Boalemo	80%	226,980,000	DAU/DAK/PAD		80%	226,980,000
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	7 Kec.	4 Kali	226,980,000	DAU/DAK/PAD		4 Kali	226,980,000
1	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	7 Kec.	4 Kali	226,980,000	DAU/DAK/PAD		4 Kali	226,980,000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	45%	178,500,000	DAU/DAK/PAD		45%	178,500,000
1	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	78,500,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	78,500,000

	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	30,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	30,000,000
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	10,000,000
	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	15,000,000
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	5,000,000
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	7,500,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	7,500,000
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	5,000,000
	7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	3,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	3,000,000
	8	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Desa se Kab. Boalemo	150 Orang	3,000,000	DAU/DAK/PAD		150 Orang	3,000,000
2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	143.000 Jiwa	100,000,000	DAU/DAK/PAD		143.000 Jiwa	100,000,000
	1	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	143.000 Jiwa	100,000,000	DAU/DAK/PAD		143.000 Jiwa	100,000,000
4		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Kab. Boalemo	100%	2,651,750,000	DAU/DAK/PAD		100%	2,651,750,000
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Kab. Boalemo	13.028 KK	1,268,116,000	DAU/DAK/PAD		13.028 KK	1,268,116,000
			Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	Kab. Boalemo	35 Kelompok	1,383,634,000	DAU/DAK/PAD		35 Kelompok	1,383,634,000
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Kab. Boalemo	13.028 KK	1,268,116,000	DAU/DAK/PAD		13.028 KK	1,268,116,000
	2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok penerima bantuan KUBE	Kab. Boalemo	35 Kelompok	1,383,634,000	DAU/DAK/PAD		35 Kelompok	1,383,634,000
5		Program Penanganan Bencana	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kab. Boalemo	45%	75,000,000	DAU/DAK/PAD		45%	75,000,000
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Kab. Boalemo	4000 Jiwa	75,000,000	DAU/DAK/PAD		4000 Jiwa	75,000,000

	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Kab. Boalemo	4000 Jiwa	75,000,000	DAU/DAK/ PAD		4000 Jiwa	75,000,000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Desa	419,050,000	DAU/DAK/ PAD		82 Desa	419,050,000
			Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	80%	385,260,000	DAU/DAK/ PAD		80%	385,260,000
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	Desa se Kab. Boalemo	82 Desa	50,000,000	DAU/DAK/ PAD		82 Desa	50,000,000
			Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	100%	136,150,000	DAU/DAK/ PAD		100%	136,150,000
			Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Org	238,862,000	DAU/DAK/ PAD		82 Org	238,862,000
			Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Desa se Kab. Boalemo	82 BUMDes	232,900,000	DAU/DAK/ PAD		82 BUMDes	232,900,000
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara E-Voting	Desa se Kab. Boalemo	1 Kegiatan	146,398,000	DAU/DAK/ PAD		1 Kegiatan	146,398,000
	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	Desa se Kab. Boalemo	82 Desa	50,000,000	DAU/DAK/ PAD		82 Desa	50,000,000
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	100%	136,150,000	DAU/DAK/ PAD		100%	136,150,000
	3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Org	238,862,000	DAU/DAK/ PAD		82 Org	238,862,000
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	Desa se Kab. Boalemo	82 BUMDes	232,900,000	DAU/DAK/ PAD		82 BUMDes	232,900,000
	5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	1 Kegiatan	146,398,000	DAU/DAK/ PAD		1 Kegiatan	146,398,000
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Organisasi yang Beranggotakan Jender	Kab. Boalemo	80%	477,980,000	DAU/DAK/ PAD		80%	477,980,000

1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kab. Boalemo	2 Keg.	477,980,000	DAU/DAK/ PAD		2 Keg.	477,980,000
	1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kab. Boalemo	2 Keg.	477,980,000	DAU/DAK/ PAD		2 Keg.

Tilamuta, Januari 2022

KERASA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002